BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Rachmat Soemitro (dalam buku Resmi, 2019), pajak merupakan: “suatu perjanjian yang timbul karena adanya undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk menyetorkan sejumlah pendapatan tertentu kepada negara, negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemaksaan harus digunakan oleh penyelenggara negara”. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting dalam membiayai operasional negara baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan negara sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan *stimulus* yang kondusif bagi dunia usaha. Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan dilain pihak bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari.

Perusahaan membutuhkan karyawan dalam menjalankan kegiatannya, dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ada banyak hal yang perlu

diperhatikan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 seorang karyawan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis Pajak Penghasilan tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing kebijakan tersebut memiliki implikasi yang berbeda-beda, aspek perpajakan yang berbeda dan beban pajak yang berbeda bagi perusahaan (Fitri, 2010).

Pajak Penghasilan berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Penghasilan yang diterima tersebut akan menambah beban pajak penghasilan oleh pegawai dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak akan menambah beban pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara dan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Air Minum Kota Padang. Untuk itu penulis mengambil judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada Perumda Air Minum Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak di antaranya:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada Perumda Air Minum Kota Padang?
2. Bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada Perumda Air Minum Kota Padang?
3. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan pada Perumda Air Minum Kota Padang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada Perumda Air Minum Kota Padang?
2. Untuk mengetahui dan memahami pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada Perumda Air Minum Kota Padang?
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan pada Perumda Air Minum Kota Padang

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir pada Perumda Air Minum Kota Padang, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Penulis:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada Perumda Air Minum Kota Padang.
- b. Dapat meningkatkan kreatifitas serta mengembangkan keterampilan dalam dunia kerja.
- c. Dapat merasakan langsung bagaimana situasi dan kondisi kerja yang sesungguhnya.
- d. Sebagai sarana latihan membandingkan materi selama diperkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada Perumda Air Minum Kota Padang.
- e. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam berorganisasi dan bersosialisasi dilingkungan kerja.

2. Bagi Instansi:

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang terhadap saran yang dikemukakan penulis sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.
- b. Sebagai sarana untuk menjembatani antara perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama.

1.5 Tempat dan Waktu Kegiatan

Pada kegiatan magang, penulis memilih Perumda Air Minum Kota Padang sebagai tempat magang dan waktu pelaksanaannya kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan Tugas Akhir

BAB II Landasan Teori

Landasan teori yang membahas tentang perpajakan secara umum diantaranya, Pengertian Pajak, unsur pajak, Fungsi Pajak, Jenis-jenis Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Syarat pemungutan Pajak, tata cara pemungutan Pajak, sistem pemungutan pajak. Pada bab ini juga membahas tentang Pajak penghasilan (PPh) khususnya PPh Pasal 21.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran perusahaan yang menjelaskan tentang sejarah umum Perumda Air Minum Kota Padang, Visi dan Misi Perusahaan, lokasi perusahaan, Tugas dan fungsi perusahaan, Struktur Organisasi, dan makna lambang PDAM Kota Padang.

BAB IV Pembahasan

Pembahasan mengenai data yang didapat selama magang, yang menjelaskan tentang uraian permasalahan bagaimana perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.

BAB V Penutup

Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul menurut pengamat penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.